



**BUPATI BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 68 TAHUN 2024
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG TATA
CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN
ALOKASI DANA DESA BAGI SETIAP DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

Menimbang : a. berdasarkan evaluasi pembagian dan penetapan rincian Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD bagi setiap Desa di Kabupaten Barito Kuala, maka perlu dilakukan perubahan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 10 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa bagi Setiap Desa Tahun Anggaran 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa bagi Setiap Desa Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

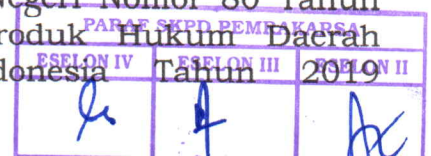
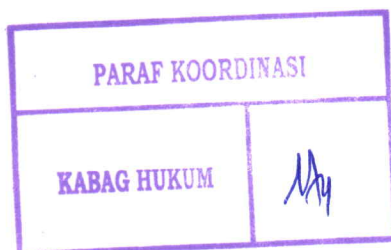
PARAF SKPD PEMRAKARSA		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

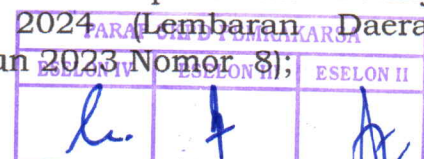
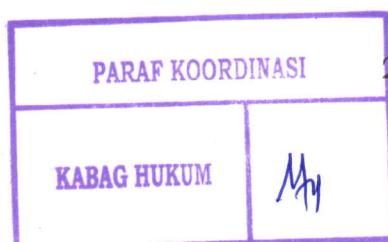
PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA		
SEKELON II		
		

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
17. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);



19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);
22. Peraturan Menteri Keuangan 199/PMK.07/2017 tentang Pengalokasian Dana Nomor Tata Cara Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Perhitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1884);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1424);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten barito Kuala Tahun 2017 Nomor 46);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 5);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 Nomor 43);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 Nomor 8);



30. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 10 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Pembagian Alokasi Dana Desa Bagi Setiap Desa Tahun 2024 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BARITO KUALA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO KUALA NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA BAGI SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 10 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa bagi Setiap Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 Nomor 10) diubah sebagai berikut :

- 1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Penganggaran Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintah Desa pada APBD Perubahan Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 115.024.424.406,- (Seratus Lima Belas Milyar Dua Puluh Empat Juta Empat Ratus Dua Puluh Empat Ribu Empat Ratus Enam Rupiah).

- 2. Ketentuan Pasal 5 ditambahkan 1 (satu) ayat baru, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) ADD sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dibagi kepada 195 (Seratus sembilan puluh lima) Desa di Kabupaten Barito Kuala dengan mempertimbangkan :
 - a. kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa; dan
 - b.jumlah penduduk Desa, tingkat kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan keterjangkauan Desa;dan
 - c. Alokasi Kinerja.
- (2) Perhitungan besaran ADD untuk setiap Desa berdasarkan kebutuhan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan memperhitungkan kebutuhan tunjangan dan jaminan sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan dan jaminan sosial BPD, serta honorarium dan jaminan sosial ketenagakerjaan Staf Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Alokasi anggaran untuk perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibagi secara proporsional setelah dikurangi kebutuhan anggaran untuk belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2).

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

PARAF SKPD PEMRAKARSA		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II
		

- (4) Alokasi kinerja untuk perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan memperhitungkan kecepatan dan ketepatan pengajuan ADD atau Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2023 dan memperhatikan capaian status Desa Tahun Anggaran 2023 masing-masing bagi 10 (sepuluh) Desa di Kabupaten Barito Kuala sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) serta kecepatan dan ketepatan penyampaian Laporan Hasil Inventarisasi Aset Desa masing-masing bagi 5 (lima) Desa di Kabupaten Barito Kuala sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (5) Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan memperhitungkan kecepatan dan ketepatan pengajuan ADD Tahap I Tahun 2024 masing-masing bagi 28 (dua puluh delapan) Desa di Kabupaten Barito Kuala sebesar Rp 8.162.293,- (Delapan Juta Seratus Enam Puluh Dua Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah) dari anggaran tambahan ADD
3. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8A

Program dan kegiatan prioritas yang didanai dari perubahan Alokasi Dana Desa ditetapkan sebagai berikut :

- (1) Pembayaran tambahan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - (2) Pembayaran perhitungan BPJS Ketenagakerjaan setelah tambahan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.
 - (3) Insentif Kader Posyandu Balita sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per orang per bulan.
 - (4) Insentif/Operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) bagi Pengurus Inti berdasarkan Struktur Organisasi sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang per bulan
 - (5) Pelatihan Tata Kelola Aset Desa Tahun Anggaran 2024
 - (6) Jasa Sewa Server Sipandes Cloud
 - (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan 4 dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
4. Ketentuan ayat (1) pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Selain digunakan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 8A, ADD dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pada bidang pembangunan desa, bidang pemberdayaan masyarakat desa, dan bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
- (2) Teknis Kegiatan prioritas yang didanai dari ADD berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang pedoman penyusunan APBDesa.

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

PARAF SKPD PEMRAKARSA		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II
		

5. Ketentuan ayat (1) pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (1) Penyaluran ADD secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tahap I paling cepat bulan Januari 2024 sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - b. Tahap II paling cepat bulan April 2024 dan paling lambat minggu kedua bulan Agustus 2024 sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. Tahap III paling cepat bulan Juli 2024 dan paling lambat minggu keempat bulan September 2024 sebesar 30% (tiga puluh persen).
 - d. Tahap IV paling cepat bulan Oktober 2024 dan paling lambat minggu keempat bulan November 2024.
 - (2) Penyaluran ADD setiap tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dana perimbangan ditransfer dari RKUN ke RKUD.
 - (3) Penyaluran ADD dilaksanakan berdasarkan surat permohonan dari Kepala Desa dan ditujukan kepada Bupati.
6. Ketentuan pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Penyaluran ADD tahap I, dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan menyampaikan :
 - a. peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran sebelumnya;
 - b. laporan realisasi penggunaan ADD Tahun Anggaran sebelumnya;
 - c. peraturan Desa tentang APBDesa;
 - d. peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDesa; dan
 - e. dokumen pelaksanaan anggaran dan rencana anggaran kas Desa.
- (2) Penyaluran ADD tahap II, dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD tahap I.
- (3) Penyaluran ADD tahap III, dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan Laporan rcalisasi penggunaan ADD tahap II, Laporan BUMDesa dan Laporan Aset Desa dari Aplikasi Sipades Tahun 2023.
- (4) Penyaluran ADD tahap IV, dilaksanakan setelah penyaluran ADD Tahap III dari RKUD ke RKD dan Bupati telah menerima Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (5) Penyaluran ADD setiap tahapan sebagaimana ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilengkapi dengan dokumen pencairan sebagai berikut :
 - a. surat pengantar dari Kepala Desa kepada Camat
 - b. surat permohonan pencairan ADD dari Kepala Desa kepada Bupati;

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

PARAF SKPD PEMRAKARSA		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II
		

- c. kwitansi pencairan ADD sesuai tahapan (bermaterai);
- d. surat pernyataan tanggungjawab mutlak (bermaterai);
- e. pakta integritas (bermaterai); dan
- f. surat pernyataan penggunaan ADD.

7. Ketentuan pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Berdasarkan permohonan dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (4), Tim Fasilitasi PKD Kecamatan melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen pencairan dan pemeriksaan SPJ untuk kelengkapan berkas permohonan pencairan Desa yang bersangkutan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan dilampiri :
 - a. surat pengantar dari Kepala Desa kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - b. surat permohonan pencairan dari Pemerintah Desa beserta lampirannya;
 - c. lembar ceklis kelengkapan dokumen pencairan dari Tim Fasilitasi PKD Kecamatan; dan
 - d. lembar pemeriksaan SPJ ADD.
- (2) Berdasarkan surat pengantar pencairan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala menerbitkan surat pengantar pencairan ADD kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan dilampiri :
 - a. surat permohonan pengajuan Pencairan Alokasi Dana Desa;
 - b. ceklist kelengkapan dokumen pencairan dari Tim fasilitasi PKD Kecamatan;
 - c. kwitansi pencairan ADD sesuai tahapan (bermaterai)
 - d. surat pernyataan penggunaan ADD;
 - e. pakta integritas (bermaterai);
 - f. surat pernyataan tanggung jawab mutlak (bermaterai); dan
 - g. print out rekening Koran.
- (3) Pengajuan pencairan ADD tahap II dan III dapat dilaksanakan Desa apabila telah mempertanggungjawabkan dana tahap sebelumnya sebesar paling sedikit 90 % (sembilan puluh persen) dengan dilampiri laporan realisasi fisik dan keuangan.
- (4) Pengajuan pencairan ADD tahap IV dilaksanakan setelah Desa melakukan pencairan Tahap III dan telah menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2024.

8. Ketentuan pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Dalam hal sampai dengan minggu keempat bulan November tahun anggaran berjalan, Desa belum mengajukan permohonan pencairan ADD, sisa dana ADD tersebut tidak bisa dicairkan lagi ke RKD dan tidak bisa dianggarkan kembali pada pendapatan Desa tahun berikutnya.

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

PARAF SIPD PEMERIKSA		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II
		

- (2) Dalam hal sampai dengan akhir bulan Desember tahun anggaran berjalan pelaksanaan kegiatan belum selesai atau belum mencapai 100% dan terdapat Silpa ADD di RKD, Kepala Desa wajib menganggarkan kembali pada rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penggunaan Silpa ADD tersebut.
- (3) Dalam hal Desa tidak tepat waktu dalam pengajuan permohonan pencairan ADD, mempengaruhi perhitungan ADD untuk tahun Anggaran 2025 .
- (4) Silpa ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan setelah ditetapkan Peraturan Desa tentang APBDesa, Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, dan Rencana Anggaran Kas telah ditetapkan.
- (5) Sisa Lebih Perhitungan ADD tahun anggaran 2023 dapat digunakan untuk :
 - a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
 - b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
 - c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 23 Oktober 2024

Pj. BUPATI BARITO KUALA,



Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 23 Oktober 2024



BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2024 NOMOR 68

Lampiran I
Peraturan Bupati Barito Kuala
Nomor 68 Tahun 2024

PENETAPAN BESARAN PERUBAHAN ALOKASI DANA DESA
BAGI DESA SE KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	KECAMATAN	DESA	JUMLAH ADD	JUMLAH ADD SETELAH PERUBAHAN AWAL	TAHAP I 30%	TAHAP II 40%	TAHAP III 30%	TAHAP IV SELISIH SETELAH PERUBAHAN
1	TABUNGANEN	KUALA LUPAK	480,994,000	602,036,000	144,298,200	192,397,600	144,298,200	121,042,000
2	TABUNGANEN	SUNGAI TELAN BESAR	469,023,000	582,198,000	140,706,900	187,609,200	140,706,900	113,175,000
3	TABUNGANEN	SUNGAI TELAN KECIL	463,038,000	572,279,000	138,911,400	185,215,200	138,911,400	109,241,000
4	TABUNGANEN	TABUNGANEN MUARA	475,009,000	592,117,000	142,502,700	190,003,600	142,502,700	117,108,000
5	TABUNGANEN	TABUNGANEN TENGAH	475,009,000	592,117,000	142,502,700	190,003,600	142,502,700	117,108,000
6	TABUNGANEN	KARYA BARU	469,023,000	582,198,000	140,706,900	187,609,200	140,706,900	113,175,000
7	TABUNGANEN	TABUNGANEN PEMURUS	586,509,000	719,170,000	175,952,700	234,603,600	175,952,700	132,661,000
8	TABUNGANEN	SUNGAI TERAS DALAM	513,038,000	622,279,000	153,911,400	205,215,200	153,911,400	109,241,000
9	TABUNGANEN	SUNGAI JINGAH BESAR	457,052,000	570,522,000	137,115,600	182,820,800	137,115,600	113,470,000
10	TABUNGANEN	TABUNGANEN KECIL	523,345,000	632,406,000	157,003,500	209,338,000	157,003,500	109,061,000
11	TABUNGANEN	SEI TERAS LUAR	457,052,000	570,522,000	137,115,600	182,820,800	137,115,600	113,470,000
12	TABUNGANEN	SEI TELAN MUARA	451,067,000	552,441,000	135,320,100	180,426,800	135,320,100	101,374,000
13	TABUNGANEN	BERINGIN KENCANA	469,023,000	582,198,000	140,706,900	187,609,200	140,706,900	113,175,000
14	TABUNGANEN	TANGGUL REJO	535,316,000	652,244,000	160,594,800	214,126,400	160,594,800	116,928,000
15	TAMBAN	PURWOSARI II	523,345,000	632,406,000	157,003,500	209,338,000	157,003,500	109,061,000
16	TAMBAN	PURWOSARI I	548,942,000	665,869,000	164,682,600	219,576,800	164,682,600	116,927,000
17	TAMBAN	TAMBAN BANGUN	482,649,000	595,823,000	144,794,700	193,059,600	144,794,700	113,174,000
18	TAMBAN	TAMBAN MUARA	541,302,000	662,163,000	162,390,600	216,520,800	162,390,600	120,861,000
19	TAMBAN	TAMBAN KECIL	469,023,000	582,198,000	140,706,900	187,609,200	140,706,900	113,175,000
20	TAMBAN	TINGGIRAN II LUAR	574,538,000	699,333,000	172,361,400	229,815,200	172,361,400	124,795,000
21	TAMBAN	JELAPAT I	580,524,000	697,451,000	174,157,200	232,209,600	174,157,200	116,927,000
22	TAMBAN	TAMBAN MUARA BARU	469,023,000	582,198,000	140,706,900	187,609,200	140,706,900	113,175,000

23	TAMBAN	PURWOSARI BARU	481,663,000	597,887,000	144,498,900	192,665,200	144,498,900	116,224,000
24	TAMBAN	SEKATA BARU	469,023,000	570,397,000	140,706,900	187,609,200	140,706,900	101,374,000
25	TAMBAN	KOANDA	457,052,000	558,426,000	137,115,600	182,820,800	137,115,600	101,374,000
26	TAMBAN	DAMSARI	457,052,000	563,906,000	137,115,600	182,820,800	137,115,600	106,854,000
27	TAMBAN	SIDOREJO	457,052,000	563,906,000	137,115,600	182,820,800	137,115,600	106,854,000
28	TAMBAN	JELAPAT BARU	598,942,000	722,851,000	179,682,600	239,576,800	179,682,600	123,909,000
29	TAMBAN	TAMBAN BANGUN BARU	457,052,000	563,906,000	137,115,600	182,820,800	137,115,600	106,854,000
30	TAMBAN	TAMBAN SARI BARU	451,067,000	556,374,000	135,320,100	180,426,800	135,320,100	105,307,000
31	ANJIR PASAR	ANDAMAN	501,067,000	610,603,000	150,320,100	200,426,800	150,320,100	109,536,000
32	ANJIR PASAR	HILIR MESJID	451,067,000	552,441,000	135,320,100	180,426,800	135,320,100	101,374,000
33	ANJIR PASAR	ANJIR PASAR KOTA	573,345,000	682,406,000	172,003,500	229,338,000	172,003,500	109,061,000
34	ANJIR PASAR	BANYUUR	457,052,000	570,522,000	137,115,600	182,820,800	137,115,600	113,470,000
35	ANJIR PASAR	GANDARAYA	495,081,000	592,522,000	148,524,300	198,032,400	148,524,300	97,441,000
36	ANJIR PASAR	GANDARIA	451,067,000	552,441,000	135,320,100	180,426,800	135,320,100	101,374,000
37	ANJIR PASAR	ANJIR PASAR KOTA II	536,971,000	646,031,000	161,091,300	214,788,400	161,091,300	109,060,000
38	ANJIR PASAR	ANDAMAN II	501,067,000	602,441,000	150,320,100	200,426,800	150,320,100	101,374,000
39	ANJIR PASAR	ANJIR SEBERANG PASAR II	463,038,000	572,279,000	138,911,400	185,215,200	138,911,400	109,241,000
40	ANJIR PASAR	ANJIR SEBERANG PASAR I	469,023,000	582,198,000	140,706,900	187,609,200	140,706,900	113,175,000
41	ANJIR PASAR	ANJIR PASAR LAMA	598,911,150	715,838,150	179,673,345	239,564,460	179,673,345	116,927,000
42	ANJIR PASAR	PANDAN SARI	495,081,000	592,522,000	148,524,300	198,032,400	148,524,300	97,441,000
43	ANJIR PASAR	MENTAREN	445,081,000	542,522,000	133,524,300	178,032,400	133,524,300	97,441,000
44	ANJIR PASAR	BARUNAI BARU	451,067,000	552,441,000	135,320,100	180,426,800	135,320,100	101,374,000
45	ANJIR PASAR	DANAU KARYA	445,081,000	542,522,000	133,524,300	178,032,400	133,524,300	97,441,000
46	ANJIR MUARA	ANJIR SERAPAT MUARA	463,038,000	572,279,000	138,911,400	185,215,200	138,911,400	109,241,000
47	ANJIR MUARA	ANJIR MUARA KOTA	542,956,000	664,112,000	162,886,800	217,182,400	162,886,800	121,156,000
48	ANJIR MUARA	PATIH MUHUR	451,067,000	552,441,000	135,320,100	180,426,800	135,320,100	101,374,000
49	ANJIR MUARA	ANJIR MUARA KOTA TENGA	586,971,000	704,194,000	176,091,300	234,788,400	176,091,300	117,223,000
50	ANJIR MUARA	ANJIR SERAPAT LAMA	457,052,000	562,360,000	137,115,600	182,820,800	137,115,600	105,308,000
51	ANJIR MUARA	ANJIR SERAPAT BARU	469,023,000	582,198,000	140,706,900	187,609,200	140,706,900	113,175,000
52	ANJIR MUARA	ANJIR MUARA LAMA	579,331,000	692,325,000	173,799,300	231,732,400	173,799,300	112,994,000
53	ANJIR MUARA	SUNGAI PUNGGU	451,067,000	552,441,000	135,320,100	180,426,800	135,320,100	101,374,000
54	ANJIR MUARA	ANJIR SERAPAT BARU I	469,023,000	582,198,000	140,706,900	187,609,200	140,706,900	113,175,000
55	ANJIR MUARA	PATIH MUHUR BARU	451,067,000	552,441,000	135,320,100	180,426,800	135,320,100	101,374,000
56	ANJIR MUARA	SEI PUNGGU BARU	457,052,000	562,360,000	137,115,600	182,820,800	137,115,600	105,308,000

57	ANJIR MUARA	ANJIR SERAPAT MUARA I	482,649,000	595,823,000	144,794,700	193,059,600	144,794,700	113,174,000
58	ANJIR MUARA	SEPAKAT BARSAMA	501,067,000	610,603,000	150,320,100	200,426,800	150,320,100	109,536,000
59	ANJIR MUARA	MARABAHAN BARU	451,067,000	552,441,000	135,320,100	180,426,800	135,320,100	101,374,000
60	ANJIR MUARA	BERINGIN JAYA	457,052,000	562,360,000	137,115,600	182,820,800	137,115,600	105,308,000
61	ALALAK	PULAU ALALAK	502,260,000	619,368,000	150,678,000	200,904,000	150,678,000	117,108,000
62	ALALAK	PULAU SEWANGI	482,649,000	603,986,000	144,794,700	193,059,600	144,794,700	121,337,000
63	ALALAK	PULAU SUGARA	482,649,000	595,823,000	144,794,700	193,059,600	144,794,700	113,174,000
64	ALALAK	SUNGAI LUMBAH	548,942,000	665,869,000	164,682,600	219,576,800	164,682,600	116,927,000
65	ALALAK	BERANGAS TIMUR	562,567,000	679,495,000	168,770,100	225,026,800	168,770,100	116,928,000
66	ALALAK	SEI SEMANGAT BHAKTI	457,052,000	562,360,000	137,115,600	182,820,800	137,115,600	105,308,000
67	ALALAK	SUNGAI PITUNG	457,052,000	562,360,000	137,115,600	182,820,800	137,115,600	105,308,000
68	ALALAK	BELANDEAN MUARA	451,067,000	552,441,000	135,320,100	180,426,800	135,320,100	101,374,000
69	ALALAK	BELANDEAN	463,038,000	572,279,000	138,911,400	185,215,200	138,911,400	109,241,000
70	ALALAK	TANJUNG HARAPAN	445,081,000	542,522,000	133,524,300	178,032,400	133,524,300	97,441,000
71	ALALAK	SEMANGAT DALAM	568,553,000	689,414,000	170,565,900	227,421,200	170,565,900	120,861,000
72	ALALAK	BERINGIN	562,567,000	687,657,000	168,770,100	225,026,800	168,770,100	125,090,000
73	ALALAK	SEMANGAT KARYA	457,052,000	562,360,000	137,115,600	182,820,800	137,115,600	105,308,000
74	ALALAK	PANCA KARYA	450,081,000	547,522,000	135,024,300	180,032,400	135,024,300	97,441,000
75	ALALAK	TATAH MESJID	496,274,000	609,449,000	148,882,200	198,509,600	148,882,200	113,175,000
76	MANDASTANA	TERANTANG	470,678,000	575,986,000	141,203,400	188,271,200	141,203,400	105,308,000
77	MANDASTANA	TANIPAH	451,067,000	552,441,000	135,320,100	180,426,800	135,320,100	101,374,000
78	MANDASTANA	PUNTIK LUAR	524,023,000	645,360,000	157,206,900	209,609,200	157,206,900	121,337,000
79	MANDASTANA	PUNTIK DALAM	457,052,000	562,360,000	137,115,600	182,820,800	137,115,600	105,308,000
80	MANDASTANA	TABING RIMBAH	542,956,000	655,950,000	162,886,800	217,182,400	162,886,800	112,994,000
81	MANDASTANA	PANTAI HAMBAWANG	451,067,000	552,441,000	135,320,100	180,426,800	135,320,100	101,374,000
82	MANDASTANA	TATAH ALAYUNG	451,067,000	552,441,000	135,320,100	180,426,800	135,320,100	101,374,000
83	MANDASTANA	PUNTIK TENGAH	523,345,000	632,406,000	157,003,500	209,338,000	157,003,500	109,061,000
84	MANDASTANA	LOKRAWA	501,067,000	602,441,000	150,320,100	200,426,800	150,320,100	101,374,000
85	MANDASTANA	SEI RAMANIA	495,081,000	592,522,000	148,524,300	198,032,400	148,524,300	97,441,000
86	MANDASTANA	BANGKIT BARU	451,067,000	552,441,000	135,320,100	180,426,800	135,320,100	101,374,000
87	MANDASTANA	ANTASAN SEGERA	445,081,000	542,522,000	133,524,300	178,032,400	133,524,300	97,441,000
88	MANDASTANA	KARANG BUNGA	470,678,000	575,986,000	141,203,400	188,271,200	141,203,400	105,308,000
89	MANDASTANA	KARANG INDAH	517,360,000	622,487,000	155,208,000	206,944,000	155,208,000	105,127,000
90	RANTAU BADAUH	SUNGAI PANTAI	548,942,000	665,869,000	164,682,600	219,576,800	164,682,600	116,927,000

91	RANTAU BADAUH	PINDAHAN BARU	529,331,000	642,325,000	158,799,300	211,732,400	158,799,300	112,994,000
92	RANTAU BADAUH	SUNGAI GAMPA ASAH	529,331,000	642,325,000	158,799,300	211,732,400	158,799,300	112,994,000
93	RANTAU BADAUH	SUNGAI GAMPA	548,942,000	665,869,000	164,682,600	219,576,800	164,682,600	116,927,000
94	RANTAU BADAUH	SUNGAI SAHURAI	463,038,000	572,279,000	138,911,400	185,215,200	138,911,400	109,241,000
95	RANTAU BADAUH	SIMPANG ARJA	445,081,000	542,522,000	133,524,300	178,032,400	133,524,300	97,441,000
96	RANTAU BADAUH	SINAR BARU	462,052,000	567,360,000	138,615,600	184,820,800	138,615,600	105,308,000
97	RANTAU BADAUH	SUNGAI BAMBAN	517,360,000	622,487,000	155,208,000	206,944,000	155,208,000	105,127,000
98	RANTAU BADAUH	DANDA JAYA	556,582,000	669,576,000	166,974,600	222,632,800	166,974,600	112,994,000
99	BELAWANG	MURUNG KERAMAT	445,081,000	542,522,000	133,524,300	178,032,400	133,524,300	97,441,000
100	BELAWANG	SUNGAI SELUANG	445,081,000	542,522,000	133,524,300	178,032,400	133,524,300	97,441,000
101	BELAWANG	BELAWANG	523,345,000	632,406,000	157,003,500	209,338,000	157,003,500	109,061,000
102	BELAWANG	BAMBANGIN	445,081,000	542,522,000	133,524,300	178,032,400	133,524,300	97,441,000
103	BELAWANG	SUKARAMAI	451,067,000	552,441,000	135,320,100	180,426,800	135,320,100	101,374,000
104	BELAWANG	SUNGAI SELUANG PASAR	523,345,000	624,719,000	157,003,500	209,338,000	157,003,500	101,374,000
105	BELAWANG	SAMUDA	451,067,000	552,441,000	135,320,100	180,426,800	135,320,100	101,374,000
106	BELAWANG	PARIMATA	451,067,000	560,128,000	135,320,100	180,426,800	135,320,100	109,061,000
107	BELAWANG	KARANG DUKUH	451,067,000	552,441,000	135,320,100	180,426,800	135,320,100	101,374,000
108	BELAWANG	PATIH SELERA	457,052,000	562,360,000	137,115,600	182,820,800	137,115,600	105,308,000
109	BELAWANG	KARANG BUAH	445,081,000	542,522,000	133,524,300	178,032,400	133,524,300	97,441,000
110	BELAWANG	BINAAN BARU	451,067,000	552,441,000	135,320,100	180,426,800	135,320,100	101,374,000
111	BELAWANG	RANGGA SURYA	451,067,000	552,441,000	135,320,100	180,426,800	135,320,100	101,374,000
112	CERBON	SUNGAI KAMBAT	457,052,000	562,360,000	137,115,600	182,820,800	137,115,600	105,308,000
113	CERBON	SUNGAI RASAU	457,052,000	562,360,000	137,115,600	182,820,800	137,115,600	105,308,000
114	CERBON	SIMPANG NUNGKI	469,023,000	582,198,000	140,706,900	187,609,200	140,706,900	113,175,000
115	CERBON	SAWAHAN	451,067,000	552,441,000	135,320,100	180,426,800	135,320,100	101,374,000
116	CERBON	BANTUL	536,971,000	646,031,000	161,091,300	214,788,400	161,091,300	109,060,000
117	CERBON	BADANDAN	457,052,000	562,360,000	137,115,600	182,820,800	137,115,600	105,308,000
118	CERBON	SEI TUNJANG	445,081,000	542,522,000	133,524,300	178,032,400	133,524,300	97,441,000
119	CERBON	SEI RAYA	445,081,000	542,522,000	133,524,300	178,032,400	133,524,300	97,441,000
120	BAKUMPAI	BANUA ANYAR	451,067,000	552,441,000	135,320,100	180,426,800	135,320,100	101,374,000
121	BAKUMPAI	MURUNG RAYA	451,067,000	552,441,000	135,320,100	180,426,800	135,320,100	101,374,000
122	BAKUMPAI	PALINGKAU	507,052,000	612,360,000	152,115,600	202,820,800	152,115,600	105,308,000
123	BAKUMPAI	BALUKUNG	457,052,000	562,360,000	137,115,600	182,820,800	137,115,600	105,308,000
124	BAKUMPAI	BANITAN	463,038,000	572,279,000	138,911,400	185,215,200	138,911,400	109,241,000

125	BAKUMPAI	BATIK	445,081,000	542,522,000	133,524,300	178,032,400	133,524,300	97,441,000
126	BAKUMPAI	BAHALAYUNG	445,081,000	550,684,000	133,524,300	178,032,400	133,524,300	105,603,000
127	BAKUMPAI	SUNGAI SELIRIK	445,081,000	542,522,000	133,524,300	178,032,400	133,524,300	97,441,000
128	KURIPAN	JAMBU BARU	469,023,000	590,360,000	140,706,900	187,609,200	140,706,900	121,337,000
129	KURIPAN	JAMBU	457,052,000	562,360,000	137,115,600	182,820,800	137,115,600	105,308,000
130	KURIPAN	KABAU	451,067,000	560,603,000	135,320,100	180,426,800	135,320,100	109,536,000
131	KURIPAN	JARENANG	451,067,000	560,603,000	135,320,100	180,426,800	135,320,100	109,536,000
132	KURIPAN	TABATAN	463,038,000	572,279,000	138,911,400	185,215,200	138,911,400	109,241,000
133	KURIPAN	KURIPAN	457,052,000	570,522,000	137,115,600	182,820,800	137,115,600	113,470,000
134	KURIPAN	TABATAN BARU	475,009,000	600,279,000	142,502,700	190,003,600	142,502,700	125,270,000
135	KURIPAN	ASIA BARU	451,067,000	552,441,000	135,320,100	180,426,800	135,320,100	101,374,000
136	KURIPAN	RIMBUN TULANG	457,052,000	562,360,000	137,115,600	182,820,800	137,115,600	105,308,000
137	TABUKAN	PANTANG RAYA	457,052,000	562,360,000	137,115,600	182,820,800	137,115,600	105,308,000
138	TABUKAN	TABUKAN RAYA	567,360,000	672,487,000	170,208,000	226,944,000	170,208,000	105,127,000
139	TABUKAN	TELUK TAMBA	517,360,000	622,487,000	155,208,000	206,944,000	155,208,000	105,127,000
140	TABUKAN	RANTAU BAMBAN	451,067,000	552,441,000	135,320,100	180,426,800	135,320,100	101,374,000
141	TABUKAN	TAMBA JAYA	457,052,000	562,360,000	137,115,600	182,820,800	137,115,600	105,308,000
142	TABUKAN	MUARA PULAU	519,023,000	632,198,000	155,706,900	207,609,200	155,706,900	113,175,000
143	TABUKAN	KARYA INDAH	445,081,000	542,522,000	133,524,300	178,032,400	133,524,300	97,441,000
144	TABUKAN	BANDAR KARYA	445,081,000	542,522,000	133,524,300	178,032,400	133,524,300	97,441,000
145	TABUKAN	KARYA MAKMUR	457,052,000	562,360,000	137,115,600	182,820,800	137,115,600	105,308,000
146	TABUKAN	KARYA JADI	517,360,000	622,487,000	155,208,000	206,944,000	155,208,000	105,127,000
147	TABUKAN	PANTANG BARU	451,067,000	552,441,000	135,320,100	180,426,800	135,320,100	101,374,000
148	MEKARSARI	MEKARSARI	556,582,000	669,576,000	166,974,600	222,632,800	166,974,600	112,994,000
149	MEKARSARI	TAMBAN RAYA	476,663,000	585,905,000	142,998,900	190,665,200	142,998,900	109,242,000
150	MEKARSARI	TINGGIRAN TENGAH	457,052,000	562,360,000	137,115,600	182,820,800	137,115,600	105,308,000
151	MEKARSARI	TINGGIRAN DARAT	488,634,000	605,742,000	146,590,200	195,453,600	146,590,200	117,108,000
152	MEKARSARI	JELAPAT II	469,023,000	582,198,000	140,706,900	187,609,200	140,706,900	113,175,000
153	MEKARSARI	TAMBAN RAYA BARU	451,067,000	557,441,000	135,320,100	180,426,800	135,320,100	106,374,000
154	MEKARSARI	TINGGIRAN BARU	496,274,000	609,449,000	148,882,200	198,509,600	148,882,200	113,175,000
155	MEKARSARI	KARANG MEKAR	457,052,000	562,360,000	137,115,600	182,820,800	137,115,600	105,308,000
156	MEKARSARI	INDAH SARI	445,081,000	542,522,000	133,524,300	178,032,400	133,524,300	97,441,000
157	BARAMBAI	BARAMBAI	523,345,000	632,406,000	157,003,500	209,338,000	157,003,500	109,061,000
158	BARAMBAI	SUNGAI KALI	529,331,000	642,325,000	158,799,300	211,732,400	158,799,300	112,994,000

159	BARAMBAL	PENDALAMAN	451,067,000	544,574,000	135,320,100	180,426,800	135,320,100	93,507,000
160	BARAMBAL	HANDIL BARABAI	439,096,000	532,603,000	131,728,800	175,638,400	131,728,800	93,507,000
161	BARAMBAL	BAGAGAP	463,038,000	572,279,000	138,911,400	185,215,200	138,911,400	109,241,000
162	BARAMBAL	BARAMBAL KARYA TANI	445,081,000	542,522,000	133,524,300	178,032,400	133,524,300	97,441,000
163	BARAMBAL	PENDALAMAN BARU	451,067,000	552,441,000	135,320,100	180,426,800	135,320,100	101,374,000
164	BARAMBAL	KARYA BARU	439,096,000	540,470,000	131,728,800	175,638,400	131,728,800	101,374,000
165	BARAMBAL	BARAMBAL KOLAM KIRI	536,971,000	646,031,000	161,091,300	214,788,400	161,091,300	109,060,000
166	BARAMBAL	BARAMBAL KOLAM KANAN	463,038,000	572,279,000	138,911,400	185,215,200	138,911,400	109,241,000
167	BARAMBAL	BARAMBAL KOLAM KIRI DAL	523,345,000	632,406,000	157,003,500	209,338,000	157,003,500	109,061,000
168	MARABAHAN	PENGHULU	511,374,000	612,568,000	153,412,200	204,549,600	153,412,200	101,194,000
169	MARABAHAN	BAGUS	517,360,000	622,487,000	155,208,000	206,944,000	155,208,000	105,127,000
170	MARABAHAN	BALUK	444,096,000	540,766,000	133,228,800	177,638,400	133,228,800	96,670,000
171	MARABAHAN	ANTAR BARU	451,067,000	552,441,000	135,320,100	180,426,800	135,320,100	101,374,000
172	MARABAHAN	ANTAR JAYA	457,052,000	562,360,000	137,115,600	182,820,800	137,115,600	105,308,000
173	MARABAHAN	ANTAR RAYA	523,345,000	632,406,000	157,003,500	209,338,000	157,003,500	109,061,000
174	MARABAHAN	SIDO MAKMUR	439,096,000	532,603,000	131,728,800	175,638,400	131,728,800	93,507,000
175	MARABAHAN	KARYA MAJU	439,096,000	532,603,000	131,728,800	175,638,400	131,728,800	93,507,000
176	WANARAYA	KOLAM KIRI	523,345,000	632,406,000	157,003,500	209,338,000	157,003,500	109,061,000
177	WANARAYA	ROHAM RAYA	523,345,000	632,406,000	157,003,500	209,338,000	157,003,500	109,061,000
178	WANARAYA	SIMPANG JAYA	517,360,000	630,649,000	155,208,000	206,944,000	155,208,000	113,289,000
179	WANARAYA	TUMIH	445,081,000	542,522,000	133,524,300	178,032,400	133,524,300	97,441,000
180	WANARAYA	PINANG HABANG	517,360,000	630,649,000	155,208,000	206,944,000	155,208,000	113,289,000
181	WANARAYA	WARINGIN KENCANA	445,081,000	550,684,000	133,524,300	178,032,400	133,524,300	105,603,000
182	WANARAYA	BABAT RAYA	445,081,000	550,684,000	133,524,300	178,032,400	133,524,300	105,603,000
183	WANARAYA	KOLAM KANAN	511,374,000	612,568,000	153,412,200	204,549,600	153,412,200	101,194,000
184	WANARAYA	SIDOMULYO	523,345,000	632,406,000	157,003,500	209,338,000	157,003,500	109,061,000
185	WANARAYA	KOLAM MAKMUR	523,345,000	632,406,000	157,003,500	209,338,000	157,003,500	109,061,000
186	WANARAYA	SURYA KANTA	517,360,000	630,649,000	155,208,000	206,944,000	155,208,000	113,289,000
187	WANARAYA	SUMBER RAHAYU	511,374,000	620,730,000	153,412,200	204,549,600	153,412,200	109,356,000
188	WANARAYA	DWIPASARI	445,081,000	542,522,000	133,524,300	178,032,400	133,524,300	97,441,000
189	JEJANGKIT	SAMPURNA	451,087,900	552,461,900	135,326,370	180,435,160	135,326,370	101,374,000
190	JEJANGKIT	JEJANGKIT BARAT	501,067,000	610,603,000	150,320,100	200,426,800	150,320,100	109,536,000
191	JEJANGKIT	BAHANDANG	451,067,000	552,441,000	135,320,100	180,426,800	135,320,100	101,374,000
192	JEJANGKIT	JEJANGKIT TIMUR	475,009,000	592,117,000	142,502,700	190,003,600	142,502,700	117,108,000

193	JEJANGKIT	CAHAYA BARU	501,067,000	602,441,000	150,320,100	200,426,800	150,320,100	101,374,000
194	JEJANGKIT	JEJANGKIT PASAR	457,052,000	562,360,000	137,115,600	182,820,800	137,115,600	105,308,000
195	JEJANGKIT	JEJANGKIT MUARA	507,052,000	612,388,356	152,115,600	202,820,800	152,115,600	105,336,356
JUMLAH			94,111,031,050	115,024,424,406	28,233,309,315	37,644,412,420	28,233,309,315	20,913,393,356

PJ. BUPATI BARITO KUALA,
DINANSYAH

Lampiran II
Peraturan Bupati Barito Kuala
Nomor 68 Tahun 2024

**PENETAPAN DESA TERCEPAT PENGAJUAN DANA DESA TAHAP I
SE KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	KECAMATAN	DESA
1	TABUNGANEN	SUNGAI JINGAH BESAR
2	TABUNGANEN	SEI TERAS LUAR
3	ANJIR PASAR	ANDAMAN
4	ANJIR PASAR	ANJIR PASAR KOTA
5	ANJIR MUARA	ANJIR MUARA KOTA
6	ANJIR MUARA	ANJIR MUARA KOTA TENGAH
7	ANJIR MUARA	SEPAKAT BERSAMA
8	ALALAK	PULAU SEWANGI
9	ALALAK	BERINGIN
10	MANDASTANA	PUNTIK LUAR
11	BAKUMPAI	BAHALAYUNG
12	KURIPAN	JAMBU BARU
13	KURIPAN	KABUAU
14	KURIPAN	JARENANG
15	KURIPAN	KURIPAN
16	KURIPAN	TABATAN BARU
17	KURIPAN	ASIA BARU
18	KURIPAN	RIMBUN TULANG
19	TABUKAN	KARYA MAKMUR
20	TABUKAN	KARYA JADI
21	MARABAHAN	BALIUK
22	WANARAYA	SIMPANG JAYA
23	WANARAYA	PINANG HABANG
24	WANARAYA	WARINGIN KENCANA
25	WANARAYA	BABAT RAYA
26	WANARAYA	SURYAKANTA
27	WANARAYA	SUMBER RAHAYU
28	JEJANGKIT	JEJANGKIT BARAT

Pj. BUPATI BARITO KUALA, 

DINANSYAH